

PELUANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ERA DISRUPSI

OPPORTUNITIES ON POVERTY REDUCTION IN DISRUPTION ERA

Muhammad Syafiq

Program Pascasarjana Studi Kebijakan UGM

Abstrak

Penurunan angka kemiskinan dalam 4 (empat) tahun terakhir ini tidak terlalu signifikan yaitu 0,51 juta jiwa. Melihat kondisi lingkungan strategis saat ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan seharusnya mampu menangkap peluang dan fokus pada masalah prioritas yang harus diselesaikan di era disrupsi. Tulisan ini menjelaskan peluang apa yang perlu ditangkap dan masalah prioritas dalam penanggulangan kemiskinan di era disrupsi. Selain itu, tulisan ini juga berupaya menjelaskan risiko yang muncul dan menjadi penghambat penanggulangan kemiskinan di era disrupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat dua peluang besar yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yaitu: pertama, adanya pergeseran relasi produksi dan modal. Hal tersebut akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan. Kedua, desa berpotensi menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia. Fenomena tersebut akan menjadi solusi bagi penanggulangan kemiskinan di desa. Guna memanfaatkan peluang tersebut dibutuhkan kapasitas SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, masalah kapasitas SDM harus menjadi prioritas kebijakan. Selain itu ada risiko yang juga harus diwaspadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu hilangnya pekerjaan-pekerjaan tertentu karena tergantikan oleh teknologi.

Kata Kunci: kemiskinan, disrupsi, *risk society*

Abstract

The decline in the poverty rate in the last 4 (four) years is not too significant (0.51 million people). Looking at the current strategic environment, poverty reduction policies should be able to capture opportunities and focus on priority issues that must be resolved in the era of disruption. This article explains what opportunities and priority issues need to be captured in poverty reduction in the era of disruption. In addition, this paper also attempts to explain the risks that arise and become a barrier to poverty alleviation in the era of disruption. The results of the analysis show that there are two big opportunities that have the potential to increase the income of the poor. First, a shift in production relations and capital. This will encourage the growth of new businesses that can provide employment. Second, the village has the potential to become a new economic center in Indonesia. This phenomenon will become a solution for poverty reduction in the village. In order to take advantage of these opportunities, quality of human resource capacity is needed. Therefore, HR capacity problems must be a policy priority. Besides that, there is a risk that must also be watched out for in efforts to reduce poverty, namely the loss of certain jobs because they are replaced by technology.

Keywords: *poverty, disruption, risk society*

A. Pendahuluan

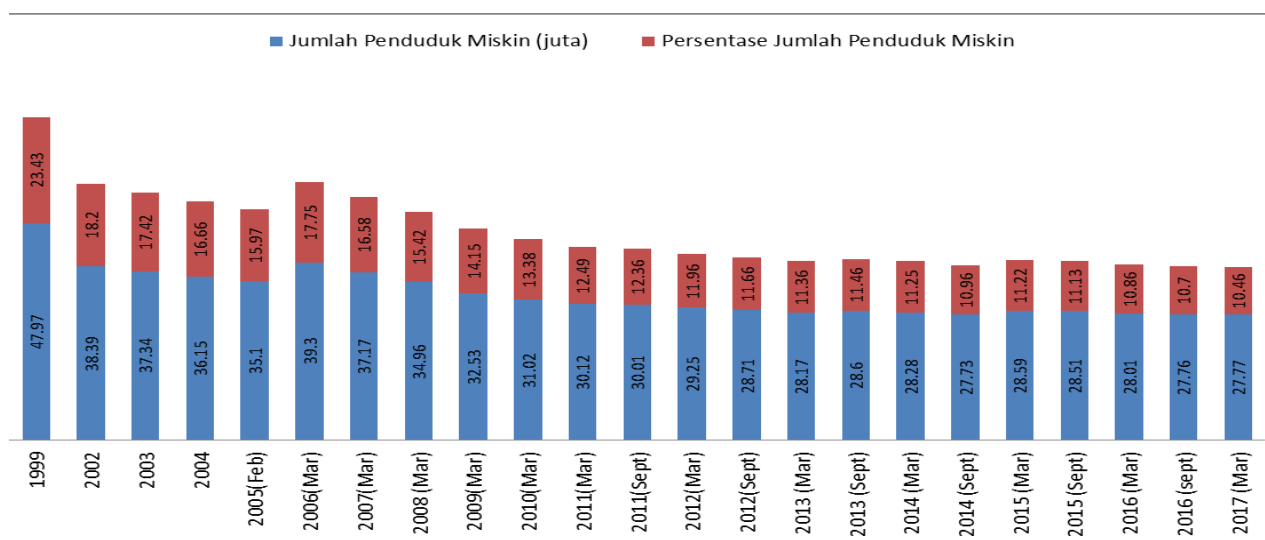
Kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Per September 2017, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa yang terdiri dari 10,27 juta penduduk perkotaan dan 16,31 penduduk pedesaan (BPS, 2017: 211). Lebih menarik lagi apabila menggunakan data dari World Bank yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia 5,7 %. Secara presentase memang terlihat lebih kecil karena World Bank menggunakan indikator yang berbeda yaitu \$1,90 per hari dengan menggunakan nilai kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) di 2011. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia dengan Indikator yang sama, maka angka kemiskinan kedua Negara tersebut 0% pada tahun 2015 (<https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC>). Artinya Indonesia tertinggal jauh dari Thailand dan Malaysia dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Berkat kerja keras semua elemen pemerintah sebenarnya angka kemiskinan

telah berhasil diturunkan tiap tahunnya. Penurunan tersebut juga terjadi pada bulan Maret 2017 yaitu sebesar 240.000 penduduk atau sebesar 0,0085%. Pada periode tahun tersebut penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 0,33 juta orang, sementara di daerah pedesaan berkurang 0,57 juta orang (Winarti dkk, 2017:7). Bahkan, berdasarkan data kemiskinan periode tahun 1999-Maret 2017, hanya pada Maret 2006, September 2013, dan Maret 2015 yang mengalami kenaikan.

Namun demikian, penurunan angka kemiskinan di Indonesia tidak terlalu signifikan jumlahnya. Dalam kurun waktu 18 (delapan belas) tahun angka kemiskinan di Indonesia hanya turun 20,2 juta jiwa. Bahkan 4 (empat) tahun pemerintah Jokowi-JK (periode Maret 2014-Maret 2017) saat ini, baru mampu menurunkan 0,51 juta jiwa penduduk miskin (Winarti dkk, 2017: 10). Secara detail data kemiskinan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Periode 1999-Maret 2017



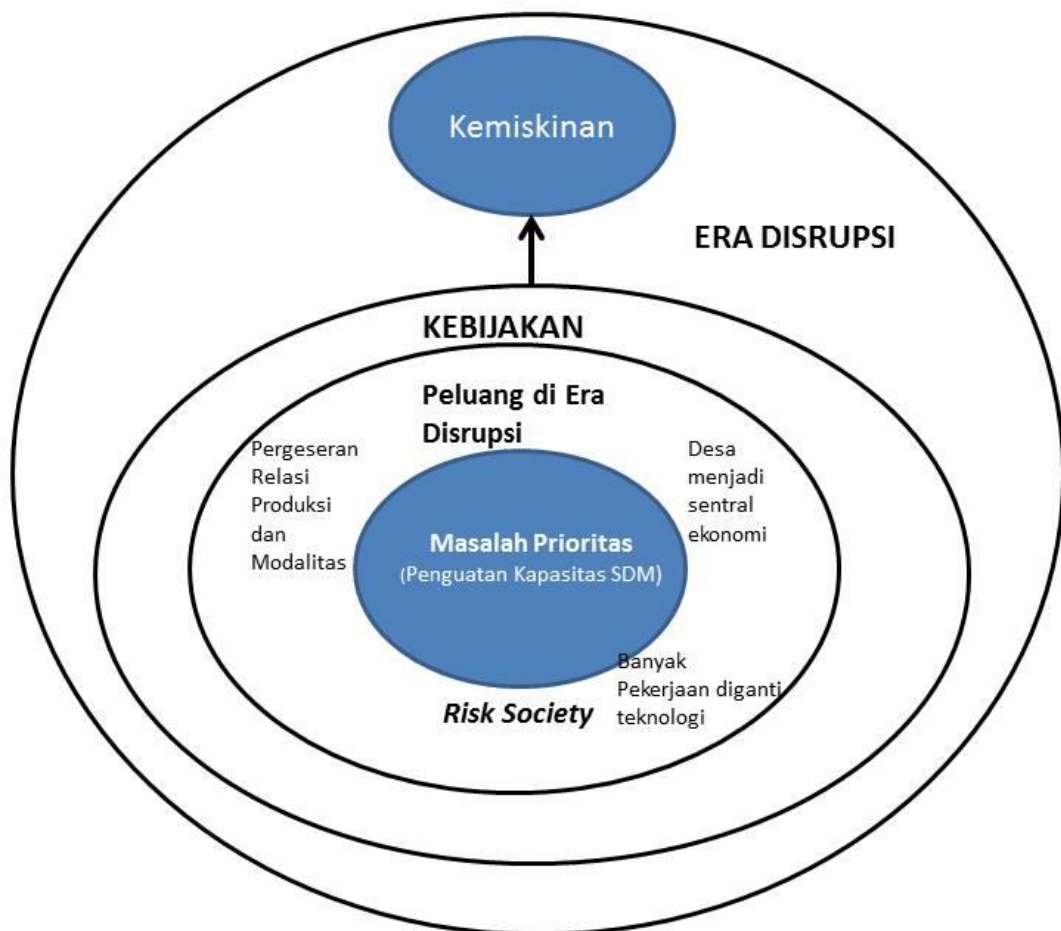
Sumber: Winarti dkk, 2017 : 10

Stagnasi penurunan angka kemiskinan 4 (empat) tahun ini dikarenakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah selain masih mengalami kendala implementasi yang belum optimal juga belum mampu mengatasi akar masalah dan menangkap peluang di era disrupsi saat ini. Masalah peningkatan SDM Kreatif dan inovatif yang seharusnya menjadi modalitas di era disrupsi belum disentuh secara maksimal oleh kebijakan pemerintah.

Digambarkan oleh Renald Kasali dalam bukunya, era disrupsi sudah tidak

berbicara tentang *sustainable innovation* tapi lebih pada apa yang disebut dengan *disruptive innovation*. Inovasi jenis tersebut didefinisikan sebagai sebuah inovasi yang benar-benar baru dan terkadang mematikan *platform* lama (Kasali, 2017). Kemunculan era tersebut merupakan imbas dari proses revolusi industri 4.0 yang mengarah pada digitalisasi. Sehingga penggunaan teknologi menjadi ciri khas di era disrupsi. Kemunculan Gojek, Bukalapak, Traveloka yang mengalahkan beberapa pemain lama konvensional merupakan contoh dari *disruptive innovation*.

Gambar 2. Problematika Masalah Penanggulangan Kemiskinan di Era Disrupsi



Sumber : Penulis

Terdapat dua peluang yang dapat menjadi kekuatan besar dalam penanggulangan kemiskinan. Pertama, adanya pergeseran relasi produksi dan modalitas. Relasi produksi yang awalnya bersifat sangat hierarkhis antara atasan-bawahan, pemilik modal-pekerja dan bersifat kaku menjadi suatu hubungan yang lebih fleksibel. Dalam *platform* perusahaan baru seperti Gojek, pegawai merupakan mitra kerja. Siapa saja bisa menjadi mitra kerja dalam *platform* usaha tersebut. Modalitas juga mengalami pergeseran. Dahulu, modal identik dengan modal kapital, namun sekarang modal bisa berupa pengetahuan, atau kompetensi. Pergeseran tersebut diharapkan dapat memunculkan usaha baru yang mampu membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Kedua, desa diprediksi akan menjadi pusat ekonomi. Gejala dari fenomena tersebut adalah kemunculan desa-desa inovatif yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Namun demikian, era disrupsi ternyata tidak hanya menghadirkan peluang bagi upaya pengentasan kemiskinan. Era tersebut ternyata juga menimbulkan risiko diantaranya adalah hilangnya beberapa pekerjaan karena digantikan dengan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas SDM harus menjadi prioritas utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

B. Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Literatur

1. Apa itu kemiskinan?

Kemiskinan telah didefinisikan bermacam-macam oleh banyak ahli. Jika ditinjau dari aspek penyebabnya, maka kemiskinan di bagi menjadi dua yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan sebagai akibat dari adanya faktor adat dan budaya daerah tertentu yang *mengkungung* mereka untuk lepas dari kemiskinan. Sedangkan kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan

seseseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil. Kemiskinan struktural identik dengan kurangnya akses terhadap sumber daya (Winarti dkk, 2017:56).

Dikotomi tentang definisi kemiskinan yang kedua dijelaskan secara konseptual. Kemiskinan, dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Perbedaan keduanya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan untuk standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non-makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan (Winarti dkk, 2017:65). Kemiskinan relatif muncul akibat kebijakan pemerintah yang belum mampu berdampak pada semua lapisan masyarakat sehingga memunculkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Kemiskinan *absolut* atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum (Winarti dkk, 2017 56-57)

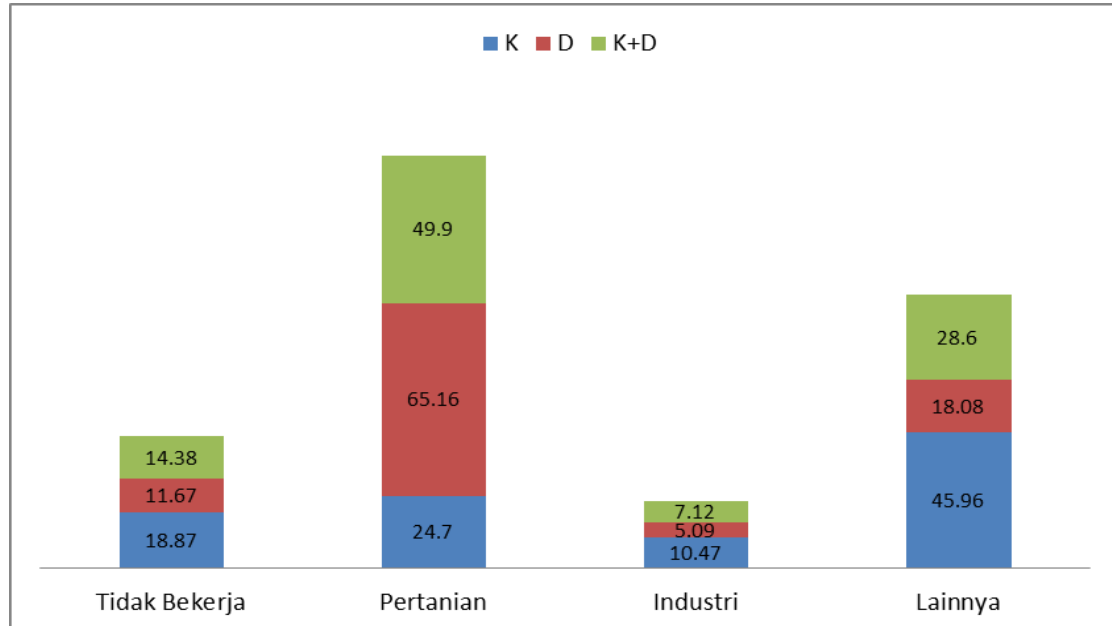
Meskipun banyak definisi tentang kemiskinan, tulisan ini akan fokus pada pendekatan yang digunakan oleh BPS dalam mengukur kemiskinan yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs method*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Winarti dkk, 2017:58).

2. Karakteristik dan Masalah Kemiskinan Prioritas

Berbicara masalah kemiskinan, terdapat tiga karakter utama yang menarik untuk di bahas. Pertama, keluarga miskin di dominasi oleh kepala rumah tangga yang berpendidikan rendah atau bahkan buta huruf. Tercatat ada 12,8 % kepala rumah tangga miskin yang tidak bisa membaca dan menulis. Apabila ditinjau dari pendidikan formal, maka tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin tergolong rendah yaitu tidak tamat SD (34,84%), SD (40,85%), SLTP(13,45%), SLTA (10,18%) serta Perguruan Tinggi (0,68%). Adanya kepala rumah tangga miskin lulusan perguruan tinggi dapat diartikan bahwa ada faktor lain selain tingkat pendidikan yang menyebabkan kemiskinan. Kedua, penduduk miskin di

pedesaan (17.097.390) lebih banyak dari pada perkotaan (10.673.830) (Winarti, 2017:9). Ketiga, Kepala rumah tangga keluarga miskin mayoritas bekerja di sektor pertanian. Jumlah kepala rumah tangga keluarga miskin yang bekerja di sektor pertanian mencapai 49,90 % (65,16% di Desa dan 24,70% di Kota). Keempat, kepala rumah tangga miskin di pedesaan maupun di perkotaan sama-sama bergantung pada sektor informal, sehingga tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan(Wibisono, 2017). Hal tersebut sangat mengkhawatirkan apabila keluarga miskin dihadapkan pada situasi-situasi tertentu seperti sakit, kecelakaan kerja dan lain-lain. Secara detail kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Sumber Penghasilan kepala Rumah Tangga keluarga Miskin



Catatan : (K = Perkotaan, D = Perdesaan, K+D = Perkotaan dan Perdesaan)

(Winarti dkk, 2017:29)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdass, kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu: pertama, *natural assets* seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya. Kedua, *human asset* menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, ketrampilannya maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi). Ketiga, *physical assets* minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan listrik, dan komunikasi di pedesaan. Keempat *financial assets* yang berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh modal usaha. Kelima, *social assets* yang berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan *bargaining position* dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. (Ramdass, 2010: 123).

Sudarwati (Sudarwati, 2009:17-18) mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan masalah kualitas SDM. Kemungkinan SDM tersebut benar-benar belum dikembangkan atau belum di gali potensi dan kompetensinya. Kurangnya kualitas SDM tersebut membuat mereka gagal mendapatkan faktor-faktor produksi seperti tanah.

Di era revolusi industri 4.0 yang di dominasi oleh inovasi, kompetensi, dan

teknologi di segala aspek kehidupan, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang paling mempengaruhi fenomena kemiskinan.

SDM dengan kualitas yang rendah akan sulit bersaing di era disrupsi yang penuh dengan inovasi. Kemunculan perusahaan *start up* seperti Bukalapak, Tokopedia, Gojek merupakan contoh bagaimana SDM yang berkualitas, kreatif dan inovatif menjadi modalitas utama dalam mendisrupsi *platform* bisnis yang sudah mendominasi sejak lama. Bukalapak dan Tokopedia tampil menjadi kompetitor bagi perusahaan retail seperti Matahari, Ramayana dan lain-lain. Sedangkan Gojek menciptakan kepanikan bagi perusahaan transportasi konvensional seperti Blue Bird.

C. Kebijakan Belum Menangkap Peluang dan Masalah Prioritas

Pemerintah Indonesia sangat konsisten terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut terbukti dengan dimasukkannya kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019. Terdapat 3 (tiga) strategi utama yang diambil pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yaitu: pertama, mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, kedua meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dan ketiga mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan. (SMERU, 2017:3).

Strategi tersebut diejawantahkan ke dalam beberapa program di beberapa kementerian. Pertama, simpanan keluarga sejahtera yang diberikan kepada keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kartu Keluarga Sejahtera adalah penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera. Kedua, program beras untuk keluarga miskin (raskin)/ Beras Sejahter (rastra). Program tersebut merupakan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Ketiga, Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin atau anak yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Keempat, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Target penerima KUR adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil (Winarti dkk, 2017: 39-42).

Selain keempat program tersebut, sebenarnya masih banyak program-program lainnya yang diselenggarakan oleh kementerian-kementerian.

Meskipun dalam 4 (empat) tahun pemerintahannya, Jokowi-JK menerapkan kebijakan tersebut secara intensif namun tidak efektif secara signifikan menurunkan angka kemiskinan. Hasil penelitian yang dilakukan SMERU menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan yang diadopsi dalam program-program kementerian masih berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, implementasi program-program tersebut juga Berbasis Data Terpadu (BDT) sehingga berpotensi salah sasaran. Hal yang krusial adalah kurang mengoptimalkan peran dari pemerintah daerah (SMERU, 2017:4-5).

Permasalahan yang dihadapi di Indonesia hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh Knight (2017). Menurutnya, terdapat tiga hal yang menyebabkan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah mengalami kegagalan. Pertama, kemiskinan sering menjadi ajang kontestasi politik. Kedua, program bersifat *top down* dan tidak melakukan pengembangan *skill*, pengetahuan dan keahlian seseorang dalam komunitas. Ketiga, tingkat kegagalan program sektor publik memang tinggi (KNIGHT, 2017:94).

Menurut Purwanto, fokus pemerintah harusnya adalah menciptakan kemandirian bagi penduduk miskin di Indonesia. Hal tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan mendorong kemunculan UMKM baru. Kemunculan UMKM tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi para keluarga miskin mengingat UMKM merupakan usaha padat karya (Purwanto, 2007:303).

Pentingnya kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan telah ditegaskan oleh Armstrong dan Taylor yang menyebutkan 5 argumen yang relevan mengenai peran UKM dalam pembangunan ekonomi regional. (Armstrong dan Taylor dalam Purwanto, 2007:307)

1. UKM mampu menciptakan lapangan kerja
2. UKM memiliki kemampuan memunculkan industri-industri kecil baru yang berani menanggung resiko
3. UKM memiliki kemampuan mendorong terjadinya persaingan secara intensif antar UKM bahkan usaha besar serupa. Hal ini sangat penting untuk mendorong lingkungan usaha yang kondusif dan berbudaya usaha yang kuat.
4. UKM mendorong inovasi
5. UKM mampu meningkatkan hubungan insdustrial (missal hubungan industry dengan buruh) dan menyediakan lingkungan kerja yang baik dengan para buruhnya.

Tentunya, menciptakan UMKM baru di era disrupsi saat ini tidak hanya terbatas pada pemberian akses keuangan. Karena, modalitas saat ini tidak hanya pada modal kapital namun juga pengetahuan, dan kompetensi. Modalitas tersebut dapat digunakan untuk menciptakan produk yang inovatif dan kreatif. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu untuk mengembangkan kapasitas SDM dan menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* mereka. Hal tersebut sangat sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Knight (KNIGHT, 2017:94).

Pengembangan kapasitas di era disrupsi tidak hanya berfokus pada pendidikan formal namun juga informal. Karena, saat ini beberapa perusahaan seperti Google merekrut pegawai tanpa memperhatikan ijazah pendidikannya (<https://www.viva.co.id/digital/422809-rekrut-karyawan-google-tidak-butuh->

ijazah-kuliah). Skema pengembangan kapasitas yang digunakan bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh UGM yang mendirikan *Innovative Academy*. Beberapa bisnis *start up* dihasilkan dan menjadi binaan dari *innovative academy* UGM diantaranya Pijar Psikologi, Villageria, Wemary, Muncak, pasienia, Galanggo dan lain-lain.

D. Harapan di Era Disrupsi : Analisis Peluang

1. Pergeseran Relasi Produksi dan Modal

Di era disrupsi saat ini, dunia usaha mengalami dua pergeseran yaitu relasi produksi dan modal. Relasi produksi sebelum industri 4.0 lebih pada atasan-bawahan, pekerja-pemilik modal dan bersifat kaku. Fenomena yang terjadi saat ini, relasi produksi lebih bersifat mitra dan lebih fleksibel. Definisi modal pun berubah dari modalitas yang bersifat material menjadi pengetahuan, inovasi, kompetensi dan lain-lain.

Relasi produksi dan modal dahulu dibangun atas fondasi teori Karl Max tentang kelas sosial. Teori tersebut menjelaskan adanya struktur tertentu yang melakukan dominasi antar kelas. *Karl max* membagi struktur sosial ke dalam kelas borjuis dan proletar. Menurutnya, kemiskinan yang terjadi dikarenakan adanya penguasaan modal kapital yang dilakukan oleh kaum borjuis. Modal dalam perspektif teori *Karl Max* merupakan modal kapital dan hanya orang yang memiliki modal kapital tersebutlah yang mampu berkembang (Bahtiyar, 2015:133). Mengakarnya teori kelas tersebut membuat relasi produksi dalam dunia bisnis pada kala itu lebih bersifat atasan-bawahan, atau pekerja-pemilik modal. Sehingga relasi yang dibangun menjadi sangat kaku karena adanya kelas yang membatasi hubungan tersebut.

Munculnya Gojek, Bukalapak dan usaha sejenis lainnya benar-benar membongkar kebiasaan selama ini. Usaha tanpa modal kapital besar bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Modal tidak hanya terbatas pada modal kapital namun juga berupa inovasi dan pengetahuan. Siapa saja yang dapat berinovasi dan menangkap peluang dapat menjadi seorang pengusaha. Relasi produksi yang dibangun dalam *platform* perusahaan di era disrupsi saat ini lebih pada mitra kerja seperti Gojek kepada *drivernya* atau Ruang Guru kepada tenaga pengajarnya.

Fenomena pergeseran tersebut telah lama digambarkan oleh Michael Foucault melalui teori kuasa pengetahuan. Menurutnya kekuasaan tidak terbatas pada penguasaan modal kapital dan kelas sosial seperti yang dibangun oleh kelompok strukturalis. Produksi wacana yang berbasis pada pengetahuan akan menciptakan kepatuhan (*Subjection*). Hal tersebut yang kemudian dibidik oleh perusahaan *start up* untuk dapat diterima pasar terutama dari kalangan milenial. Inovasi-inovasi kreatif yang berbasis pada pengetahuan pada bisnis *start up* dapat mendapatkan kepercayaan dari pasar (Foucault, 2002). Kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, pergeseran tersebut memberikan peluang munculnya bisnis-bisnis baru dan siapapun bisa menjadi mitra kerja. Potensi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan penduduk miskin semakin besar.

2. Pergeseran Pusat Ekonomi dari Kota Ke Desa

Dana desa yang digulirkan secara masif oleh pemerintah Jokowi-JK saat ini

menciptakan paradoks pembangunan di Indonesia. Ketika bermunculan *Megacities* di dunia saat ini, di Indonesia terjadi perkembangan ekonomi di beberapa desa. Renald Kasali dalam bukunya yang berjudul “The Great Shifting” memprediksi akan ada fenomena *shifting* dari kota ke desa. Desa akan menjadi pusat ekonomi di Indonesia (Kasali, 2018: 284-288).

Pergerakan tersebut dapat dilihat gejalanya mulai dari sekarang. Desa Umbul Pongok, Klaten, Jawa Tengah merupakan salah satu desa yang saat ini berhasil mengelola destinasi pariwisata yang dapat menghasilkan omzet 15 miliar pertahun (2017). Selain itu terdapat wisata kaliburu di Kabupaten Kulonprogo yang dinobatkan menjadi tempat wisata terbaik tahun 2017 dengan omzet kotor 5 miliar pertahun. Beberapa desa tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Kasali, 2018:290).

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, pergeseran tersebut berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan mengurangi angka kemiskinan yang sampai saat ini terkonsentrasi di Desa. Fenomena tersebut akan mendorong diversifikasi penghasilan yang sebelumnya terkonsentrasi pada sektor pertanian. Contohnya adalah Desa Panggungharjo yang telah memiliki 5 (lima) unit usaha yaitu jasa pengelolaan sampah, jasa pengelolaan barang bekas, pengelolaan minyak jelantah, swalayan desa dan Kampung Mataraman (<http://jogja.tribunnews.com/2018/09/13/kelompok-marjinal-turut-berperan-di-balik-suksesnya-bumdes-di-panggungharjo>).

E. Perspektif *Risk Society* dalam Penanggulangan Kemiskinan

Teori tentang *risk society* dikenalkan Ulrich Beck yang menggambarkan proses perubahan sosial pasca industrialisasi. Menurutnya, telah terjadi perubahan dari modernitas lama ke arah modernitas lanjut. Individu pada masa modernitas lanjut akan semakin sulit untuk memprediksi kondisi masa depannya karena penuh dengan risiko dan ketidakpastian yang besar. Dalam kondisi masyarakat risiko, individu akan terus berjuang untuk meminimalisir risiko untuk memperoleh keamanan dan kepastian. Jenis-jenis risiko yang biasanya muncul adalah risiko bencana alam, kemiskinan, akses pendidikan dan lain-lain. (Beck, 1992 dalam Sutopo & Meiji, 2014:1166-1168)

Selain itu, Beck juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat risiko, kehidupan semakin terindividualisasi. Artinya tanggung jawab dalam kehidupan sosial akan berada pada individu. Oleh karena itu, setiap individu harus memiliki perencanaan dalam pendidikan atau pekerjaan (Beck, 1992 dalam Sutopo & Meiji, 2014:1166-1168).

Berbicara dalam konteks era disrupsi yang penuh dengan ketidakpastian seperti saat ini, risiko yang diprediksi akan muncul adalah hilangnya jenis pekerjaan-pekerjaan tertentu dan akan digantikan dengan teknologi. Namun demikian akan muncul jenis-jenis pekerjaan baru yang bisa dijadikan peluang (Kasali, 2018; Tanjung, 2018). Secara detail kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Prediksi Pekerjaan Hilang dan Pekerjaan Baru di Era Disrupsi

Pekerjaan Hilang	Jumlah	Pekerjaan Baru	Jumlah
Perkantoran dan Administrasi	-4.759	Bisnis dan Finansial	+492
Manufaktur dan Produksi	-1.609	Manajemen	+416
Konstruksi dan Tembang	-497	Komputer dan Matematika	+405
Seni, Desain, Entertainment, Olahraga, dan Media	-151	Arsitektur dan Teknik	+339
Hukum	-109	Sales	+303
Instalasi dan Maintenance	-40	Pendidikan dan Training	+66

Sumber: World Economic Forum dalam Tanjung, 2018

Gambaran tentang *risk society* di atas menggambarkan bahwa meskipun di era disrupsi ada banyak peluang namun juga terdapat risiko yang harus diwaspadai. Maka setiap individu harus berjuang untuk menghindari risiko kemiskinan melalui pengetahuan, dan kompetensi. Chairul Tanjung sebagai praktisi di dunia bisnis

mengungkapkan dalam acara *executive lecture* di UGM pada tanggal 30 November 2018 bahwa di era disrupsi saat ini, produktivitas dan efisiensi saja tidak cukup. Menurutnya, dibutuhkan kreativitas, inovasi dan *entrepreneurship* dan untuk mewujudkan hal tersebut tentunya dibutuhkan SDM berkualitas.

F. KESIMPULAN

Penanggulangan terhadap masalah kemiskinan mengalami stagnasi yang sangat lama. Oleh karenanya diperlukan sebuah kebijakan yang mampu mengatasi akar masalah kemiskinan dan mampu menangkap peluang di era disrupsi saat ini. Masalah terpenting yang harus diselesaikan guna mengatasi permasalahan kemiskinan adalah terkait kapasitas SDM. Pengetahuan dan Kompetensi seseorang sangat dibutuhkan untuk membangun inovasi-inovasi terbaik yang dapat ditransformasikan menjadi suatu produk yang memiliki daya tarik pasar.

Di era yang penuh dengan ketidakstiaan saat ini, terdapat dua peluang besar yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Pertama, pergeseran relasi produksi dan modalitas. Kedua, terkait pergeseran pusat ekonomi dari Kota ke Desa. Kedua peluang tersebut berpotensi menciptakan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. Namun demikian, era disrupsi juga menyisakan potensi risiko dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Beberapa jenis pekerjaan berpotensi untuk tergantung dengan teknologi yang menjadi ciri khas era disrupsi.

G. REKOMENDASI

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang di jelaskan di atas ada beberapa rekomendasi yang diusulkan yaitu:

1. Pengembangan kapasitas SDM seyogyanya menjadi prioritas kebijakan pengentasan kemiskinan di era disrupsi. Sehingga SDM keluarga miskin di Indonesia dapat secara mandiri terlepas dari belenggu kemiskinan. Melihat kesempatan yang terbuka lebar di era saat ini.
2. Perlunya menumbuhkan jiwa *entrepreneurship*. Harapannya akan

tercipta usaha-usaha baru yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi keluarga miskin.

Optimalisasi penggunaan dana desa penting untuk mengatasi masalah kemiskinan di desa. Contoh-contoh sukses pengelolaan dana Desa seharusnya dapat menjadi pembelajaran penting bagi desa lainnya untuk menjadi pusat-pusat ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahtiyar, E. (2015). Kritik Islam Terhadap Konsep Marxisme. *Profetika*, 16, 127–135.
- BPS. (2017). *Statistik Indonesia 2018*. BPS (Vol. 91).
- Foucoult, Michel. 2002. *Kuasa/Pengetahuan ; Selected Interviews & Other Writings 1972-1977*. Yogyakarta: Bentang Budaya
- Kasali, Renald. 2017. *Disruption*. Jakarta: PT Gramedia
- Kasali, Renald. 2017. *Tomorrow is Today*. Bandung: Mizan
- Kasali, Renald. 2018. *The Great Shifting*. Jakarta PT Gramedia
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(nomor 3. Maret 2007), 295–324.
- Ramdass, R. (2010). Managerial communication - The key to continuous engagement and competitive advantage. *Proceedings - European Aviation Safety Seminar, EASS*, 8(3), 585–597.
- Sudarwati, Ninik. 2009. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan : Mengurangi kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*. Malang: Intimedia
- SMERU. (2017). Reformulasi Strategi Nasional Percepatan Penanggulangan

- Kemiskinan, (1), 1–20.
- Sutopo, O. R., & Meiji, N. H. P. (2014). Transisi Pemuda dalam Masyarakat Risiko: Antara Aspirasi, Hambatan dan Ketidakpastian, Oki Rahadiano Sutopo Nanda Harda Pratama Meiji. *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 11.
- Wibisono, Y. (2017). Peta Kemiskinan Indonesia.
- Winarti, Y. G. dkk. (2017). *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2017*. Jakarta_Indonesia: Badan Pusat Statistik.

Website

- Tribunnews.com, 2018, “Kelompok Marjinal Turut Berperan di Balik Suksesnya Bumdes di Panggungharjo.” <http://jogja.tribunnews.com/2018/09/13/kelompok-marjinal-turut-berperan-di-balik-suksesnya-bumdes-di-panggungharjo>).
- Viva.co.id, 2018, “Rekrut Karyawan Google Tidak Butuh Ijazah.” (<https://www.viva.co.id/digital/422809-rekrut-karyawan-google-tidak-butuh-ijazah-kuliah>).